

BAB I

PENDAHULUAN

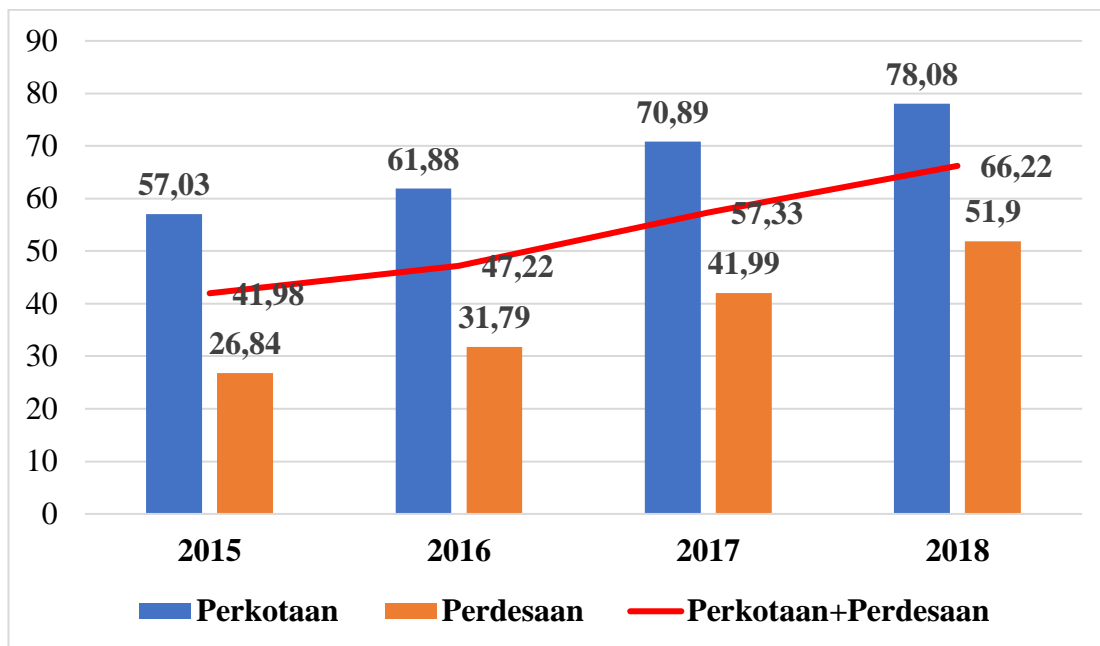
1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut setiap negara untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut bertujuan agar tidak tertinggal dari negara lain, khususnya di negara Indonesia. Berbagai program teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang semakin canggih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitas hariannya, karena segala aktivitas dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, murah, dan tepat, sehingga manusia dapat memaksimalkan produktivitas kerjanya. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dimanfaatkan di berbagai sektor, baik di dunia pemerintahan (*e-government*), bisnis (*e-commerce*), pendidikan (*e-education*), perbankan (*e-banking*), maupun kegiatan lain yang berbasis pada penggunaan elektronika.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat di mana terdapat kenaikan persentase jumlah akses internet menurut klasifikasi daerah, yakni pada tahun 2015 hingga tahun 2018 yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.1

Grafik Persentase Penggunaan Akses Internet menurut Klasifikasi Daerah



Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2019

Penggunaan akses internet di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua daerah, yakni daerah Perkotaan dan Perdesaan. Penggunaan akses internet menurut klasifikasi daerah mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Di daerah Perkotaan, persentase penggunaan akses internet pada tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 21,05%. Berbeda halnya dengan daerah Perdesaan, persentase penggunaan akses internet pada tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan sebesar 25,06%. Di daerah Perkotaan dan Perdesaan, persentase penggunaan akses internet pada tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan sebesar 24,24%. Dengan demikian, perkembangan teknologi di Indonesia berdasarkan penggunaan akses internet mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan persentase

penggunaan akses internet dari tahun 2015 sampai dengan 2018 baik di daerah Perkotaan maupun Perdesaan.

Kemajuan teknologi informasi sangat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi yang semakin luas jangkauannya membantu para pelaku pelayanan publik untuk mengambil keputusan. Penggunaan teknologi informasi kini juga dimanfaatkan dalam kegiatan administrasi, pelayanan, pengelolaan data kepegawaian, maupun transparansi informasi publik. Di bidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi internet dikenal sebagai *e-government*. Menurut Suaedi (2010:54), *e-government* ialah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara umum.

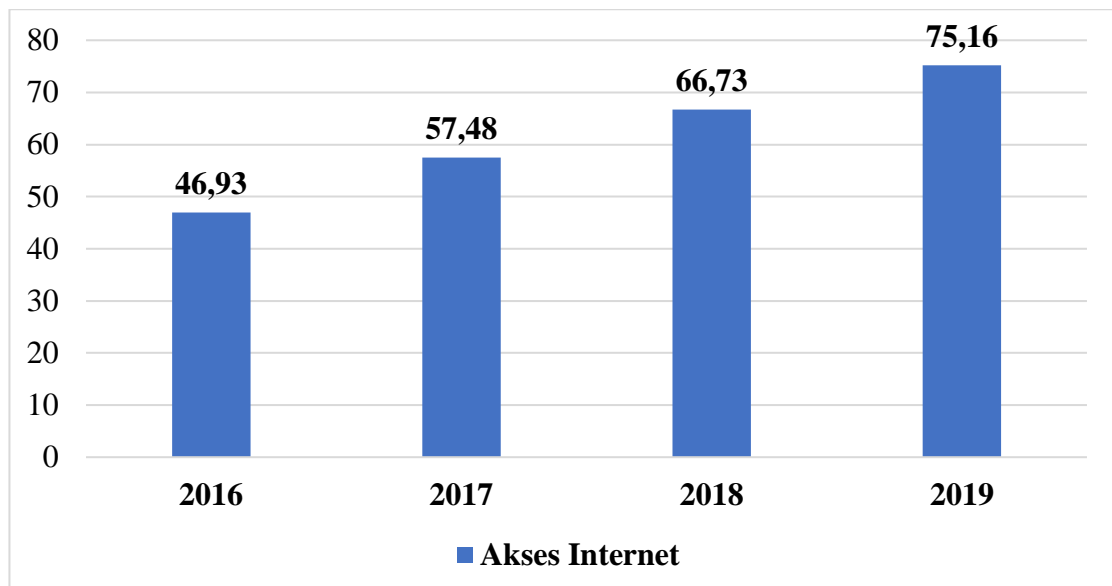
Inovasi *e-government* sudah mulai dikembangkan. Inovasi *e-government* dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang menginginkan adanya sistem yang saling terintegrasi. Menurut Derry (2019:1), pengembangan *e-government* di Indonesia didukung oleh regulasi yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Beberapa regulasi tersebut menuntut agar setiap instansi publik untuk mengimplementasikan *e-government* dalam rangka mendukung tata kelola

pemerintahan dan pelayanan yang publik yang baik, yakni di tingkat pusat, daerah, maupun desa.

Era digital seperti saat ini sejalan dengan revolusi industri 4.0. Hal tersebut mengakibatkan semakin berkembangnya teknologi informasi di kalangan masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha/perusahaan maupun pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan dan pemberian transparansi kepada publik. Perkembangan teknologi informasi di Jawa Tengah ditandai dengan adanya persentase penggunaan akses internet pada tahun 2016 hingga tahun 2019.

Gambar 1.2

Grafik Persentase Penggunaan Akses Internet di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Penggunaan akses internet sebagai wujud perkembangan teknologi informasi di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019, persentase penggunaan akses internet di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 28,23%. Hal tersebut menandakan bahwa

internet menjadi kebutuhan vital bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Internet sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, baik sebagai kebutuhan bisnis, pemerintahan, ekonomi, maupun sebagai sumber akses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Jawa Tengah diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni melalui penerapan *e-government*. *E-government* merupakan suatu sistem di mana pemerintah menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet. *E-government* dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada publik. Penerapan *e-government* di Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian peraturan tersebut mengalami perubahan menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adanya regulasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki strategi perencanaan dalam rangka membangun *e-government*. Penerapan *e-government* ini tidak hanya diterapkan pada lingkup Provinsi saja, melainkan juga diterapkan di lingkup Kabupaten/Kota, bahkan sampai ke Desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Guna menjawab berbagai permasalahan yang ada di tingkat desa, maka dalam penerapan *e-government* desa

memerlukan suatu perencanaan yang matang. Hal tersebut mendasari adanya inisiatif dari pemerintah tingkat desa untuk menjalankan Sistem Informasi Desa. Pernyataan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mengembangkan sistem informasi desanya. Harapan baru muncul setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut membawa harapan baru, yakni untuk pembangunan tingkat desa. Pada dasarnya, pembangunan tingkat desa membutuhkan suatu sistem informasi. Sistem informasi menjadi sangat penting bagi sebuah desa.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan implementasi *e-government* sebagai salah satu wujud penyelesaian masalah yang muncul pada tatanan pemerintahan desa. Desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa ini merupakan sebuah sistem informasi yang menghubungkan antar fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Adanya Sistem Informasi Desa (SID), dapat membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa untuk membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan *software*. Program Sistem Informasi Desa (SID) dapat membantu pemerintahan desa dan masyarakatnya, yakni untuk mendokumentasikan data-data milik desa maupun kegiatan masyarakat desa menjadi lebih mudah.

Provinsi Jawa Tengah mulai mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) pada tahun 2016, yang bertujuan sebagai salah satu alat untuk pembangunan desa

di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan Sistem Informasi Desa berdasarkan pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Guna mewujudkan Sistem Informasi Desa di setiap pemerintahan desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa. Adanya regulasi tersebut menjadi himbauan bagi Pemerintah Daerah di Jawa Tengah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Desa.

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagian besar telah menjalankan Sistem Informasi Desa. Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah menjalankan Sistem Informasi Desa mulai tahun 2019. Sebagai tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang membuat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa, Pemerintah Kabupaten Kendal menerapkan Sistem Informasi Desa, kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan, yang terbagi menjadi 287 kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Informasi Desa berbasis *website*.

Desa Purwogondo menjadi salah satu Desa di Kecamatan Boja yang menerapkan Sistem Informasi Desa berbasis *website*. Desa Purwogondo memiliki berbagai potensi desa. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal tahun 2020, potensi Desa Purwogondo adalah di bidang pertanian, bidang perkebunan, dan bidang peternakan. Potensi di bidang pertanian dengan luas lahan sawah irigasi sederhana sebesar 147 Ha, bidang perkebunan dengan luas sebesar 66,25 Ha, dan

bidang peternakan terdiri dari 158 sapi potong dan 160 sapi perah. Adanya potensi yang dimiliki, desa berhak untuk mengenalkan kepada publik. Hal tersebut merupakan salah satu upaya agar dapat diketahui masyarakat secara umum, serta dapat memanfaatkan maupun mengembangkan potensi yang ada. Potensi desa yang dimiliki oleh Desa Purwogondo dapat dikenalkan melalui Sistem Informasi Desa.

Desa Purwogondo juga menjadi lima dari delapan belas desa di Kecamatan Boja yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tertinggi, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Boja Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Dana Desa
1.	Meteseh	1178,009,984.00
2.	Boja	1095,963,008.00
3.	Bebengan	1067,678,016.00
4.	Kaligading	1000,907,008.00
5.	Purwogondo	892,496,000.00
6.	Trisobo	891,739,008.00
7.	Pasigitan	890,472,000.00
8.	Campurejo	867,428,992.00
9.	Ngabean	867,376,000.00
10.	Blimbing	866,046,016.00
11.	Kliris	847,929,984.00
12.	Tampingan	817,667,968.00
13.	Leban	818,476,032.00
14.	Banjarejo	806,723,968.00
15.	Medono	804,518,016.00
16.	Puguh	804,348,032.00
17.	Salamsari	784,448,000.00
18.	Karangmanggis	781,344,000.00

Sumber: Olah Data Peneliti Tahun 2021

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat lima desa di Kecamatan Boja yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tertinggi. Kelima desa tersebut meliputi Desa Meteseh, Desa Boja, Desa Bebengan, Desa Kaligading, dan

Desa Purwogondo. Desa Purwogondo menjadi urutan kelima pada desa yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tertinggi di Kecamatan Boja, yakni sebesar Rp 892,496,000.00. Besaran jumlah dana desa yang dimiliki oleh Desa Purwogondo telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Purwogondo untuk mempublikasikan laporan realisasi dana desa melalui Sistem Informasi Desa. Hal tersebut bertujuan agar tercipta akuntabilitas dan transparansi atas dana desa yang dimiliki, sehingga masyarakat juga dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai dana desa, serta masyarakat juga dapat berperan untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa Purwogondo dalam merealisasikan dana desa.

Berdasarkan data yang diperoleh, Desa Purwogondo termasuk 10 dari 18 kelurahan di Kecamatan Boja yang aktif dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website*. Adapun 10 kelurahan di Kecamatan Boja yang aktif dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Website Sistem Informasi Desa Aktif

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Website
1.	Boja	Trisobo	http://trisobo.desa.id/
2.	Boja	Boja	http://boja-kendal.desa.id/
3.	Boja	Bebengan	http://bebengan.desa.id/
4.	Boja	Leban	http://leban.desa.id/
5.	Boja	Meteseh	http://meteseh.desa.id/
6.	Boja	Kliris	http://kliris.desa.id/
7.	Boja	Purwogondo	http://purwogondo.kendalkab.go.id/
8.	Boja	Kaligading	http://kaligading.desa.id/
9.	Boja	Campurejo	http://campurejo.desa.id/
10.	Boja	Blimbing	http://blimbing-boja.desa.id/

Sumber: Olah Data Tahun 2020

Pada tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Desa Purwogondo merupakan salah satu desa di Kecamatan Boja yang terdata aktif berdasarkan *website* yang dimiliki. Aktifnya *website* tersebut merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang dapat diakses dengan mudah. Sebelum adanya *website* yang terintegrasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Desa Purwogondo belum memiliki media informasi yang dapat diakses oleh publik, setelah adanya *website* resmi Desa Purwogondo, maka kabar terkini desa dapat diakses oleh masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada lagi batasan untuk masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan pemerintah desa melalui kabar desa.

Website Desa Purwogondo mulai aktif pada tahun 2019 sejak diterapkannya Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kendal. *Website* tersebut dikelola oleh Perangkat Desa Purwogondo atau bisa disebut sebagai operator Sistem Informasi Desa (SID). Pemanfaatan *website* Desa Purwogondo sebagai media informasi bagi masyarakat seharusnya memuat berbagai kegiatan atau aktivitas yang ada di Desa Purwogondo, atau kegiatan tersebut dapat dikenal sebagai kabar desa. Kabar desa yang dimuat meliputi berita desa, kegiatan desa, dan agenda desa. Pada kenyataannya, *website* Desa Purwogondo belum dimaksimalkan oleh Perangkat Desa Purwogondo atau operator Sistem Informasi Desa (SID) itu sendiri untuk memperbarui kabar desa. Kabar Desa yang di *posting* melalui *website* Desa Purwogondo hanya terdapat 1 *posting* berita, 1 *posting* kegiatan, serta tidak adanya agenda desa yang ditampilkan di Sistem Informasi Desa (SID). Adapun tampilan

dari berita desa yang ditampilkan di Sistem Informasi Desa (SID) dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.3
Tampilan Berita di Website Desa Purwogondo

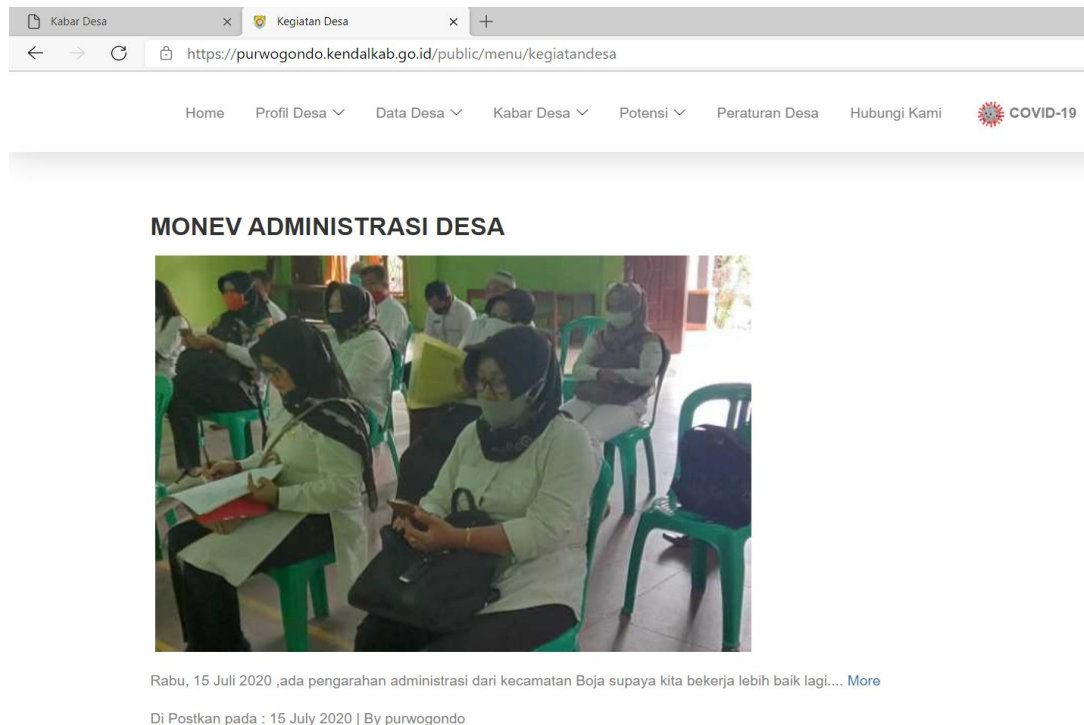


Sumber: <http://purwogondo.kendalkab.go.id/public/menu/kabardesa>

Informasi yang disampaikan melalui *website* belum informatif. Informasi yang disampaikan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang sebagaimana mestinya berita mengenai desa disampaikan. Informasi yang di *posting* tersebut cenderung informasi pribadi bagi kalangan Perangkat Desa Purwogondo. Di dalam *posting* tersebut juga tidak ada penjelasan atau deskripsi mengenai gambar yang di *posting*, sehingga masyarakat tidak mengetahui detail dari berita yang disampaikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui

website Desa Purwogondo, hanya terdapat 1 *posting* berita desa sejak diterapkannya *website* Sistem Informasi Desa (SID) pada tahun 2019.

Gambar 1.4 **Tampilan Kegiatan di *Website* Desa Purwogondo**



Sumber: <http://purwogondo.kendalkab.go.id/public/menu/kegiatan desa>

Kegiatan desa yang di *posting* di Sistem Informasi Desa dapat diketahui melalui gambar 1.4. Pada gambar 1.4, dapat diketahui bahwa di Desa Purwogondo hanya terdapat 1 *posting* kegiatan. *Posting* kegiatan yang ada yakni tentang kegiatan *monitoring* dan evaluasi administrasi desa. Pada *posting* kegiatan desa, belum menampilkan adanya deskripsi yang jelas mengenai kegiatan desa yang sedang dilaksanakan. Adanya hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengetahui deskripsi yang jelas atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Seberapa jauh perkembangan kabar desa melalui *website* dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yakni Perangkat Desa Purwogondo sebagai operator Sistem Informasi Desa. Sumber daya manusia di Desa Purwogondo dapat dikatakan belum mampu memanfaatkan *website* tersebut untuk mengembangkan kabar desa. Informasi yang disampaikan melalui Bapak Widi selaku Perangkat Desa Purwogondo, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya bisa saja kami mengelola *website* Desa Purwogondo ini, tetapi dalam pelaksanaannya kami selaku Perangkat Desa terkadang mengalami kesusahan untuk dapat memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia. Ditambah kegiatan yang ada di desa tidak seluruhnya dapat dimuat di *website* tersebut. Kadang ada kesibukan dari masing-masing perangkat. Kalau dari akses internet sebenarnya sudah mendukung di Balai Desa ini sudah ada *wifi* nya.” (Wawancara tanggal 30 November 2020).

Informasi yang disampaikan di atas menandakan bahwa Perangkat Desa Purwogondo dari segi sumber daya manusia belum maksimal untuk dapat mengembangkan *website* desa. Padahal sudah ada pendukung yakni adanya akses internet. Selain informasi tersebut, informasi lain diperoleh dari Bapak Lysin selaku Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, mengatakan bahwa:

“Mungkin perangkat desanya sibuk jadi tidak sempat mengisi konten *website* nya. Dari Diskominfo Kendal sudah mengadakan bintek, walau tidak sering. Kurang lebih dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Tapi kalau misal desa ingin belajar cara pengisian atau pengelolaan *website* bisa datang langsung ke Diskominfo Kendal, dan untuk Desa Purwogondo sendiri sudah pernah didatangi dua kali oleh Diskominfo Kendal terkait *website* desa.” (Wawancara tanggal 27 November 2020).

Informasi di atas menandakan bahwa pengelolaan *website* desa bergantung pada sumber daya manusia, yakni perangkat desa itu sendiri. Di dalam rangka pengelolaan *website* desa, Desa Purwogondo telah didukung oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal melalui Bimbingan Teknis pengelolaan *website* desa. Desa Purwogondo juga telah didatangi langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sebanyak dua kali terkait *website* desa.

Permasalahan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Apriyansyah, yang meneliti mengenai Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Pada penelitian tersebut, hasil temuan menyatakan bahwa terdapat permasalahan mengenai sumber daya manusia dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID). Hal tersebut disebabkan oleh para Perangkat Desa Dlingo yang belum mempunyai kemampuan untuk membuat konten informasi yang baik, misalnya dalam membuat berita maupun artikel-artikel yang menarik, dan juga kurangnya regenerasi di dalam struktur pemerintahan Desa Dlingo.

Permasalahan lain mengenai penerapan Sistem Informasi Desa juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rihardi dkk, yang meneliti mengenai Efektivitas Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Dengan SIKDES (Sistem Informasi Konektivitas Desa) Studi Kasus di Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan Sistem Informasi Konektivitas Desa adalah kemampuan sumber daya manusia, yakni Perangkat Desa Sidorejo, sehingga menyebabkan proses pelayanan di Desa Sidorejo menjadi terhambat. Penyebab lainnya yakni adanya ketidakdisiplinan dari Perangkat Desa Sidorejo dalam

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten.

Permasalahan-permasalahan yang muncul memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Kabar desa melalui *website* Desa Purwogondo tidak mengalami perkembangan. Sejak tahun 2019, hanya terdapat 1 *posting* berita dan 1 *posting* kegiatan.
2. Informasi yang di *posting* di *website* desa kurang informatif.
3. Kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh Kasie Pemerintahan selaku Operator Sistem Informasi Desa dalam mengelola Sistem Informasi Desa, sehingga belum mampu untuk mengembangkan kabar desa.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal?
2. Apa faktor-faktor penghambat efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk mengaplikasikan teori-teori yang ada di manajemen publik, dengan fokus mengenai efektivitas sistem informasi. Dengan demikian, dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai efektivitas sistem informasi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah untuk memberikan informasi mengenai Sistem Informasi, dan memberikan informasi mengenai objek penelitian tentang efektivitas sistem informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Desa Purwogondo, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau mengevaluasi suatu program.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

Tahun 1	Pengarang 2	Artikel 3	Tujuan 4	Temuan 5
2013	Arib Hilmy Raihan.	Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara.	Untuk menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara.	Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur sejauh ini dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pengukuran tingkat efektivitas menurut Siagian di mana pengukuran efektivitas terdiri dari enam hal, meliputi sumber daya, dana dan fasilitas penunjang, mutu dan jumlah barang atau jasa, batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa, dan tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan faktor pendukung dalam penerapan Aplikasi Si-Daleh di Desa Rapak Lambur, yakni infrastruktur komunikasi dan perangkat keras seperti komputer, <i>wi-fi</i> yang telah mendukung atau telah terpenuhi untuk mendukung penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh), dan juga sumber daya manusia yakni staf desa yang telah memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh), sedangkan berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan faktor penghambat, yakni terletak pada anggaran dana pengoperasian yang belum optimal. Di dalam hal ini Desa Rapak mengalami krisis anggaran, yang mengakibatkan Pemerintah Desa Rapak Lambur tidak bisa mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) secara <i>online</i> .

Tahun	Pengarang	Artikel	Tujuan	Temuan
2018	Apriyansyah	Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.	Untuk mengetahui Sistem Informasi Desa dalam pelayanan publik di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.	Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) didukung oleh 6 indikator, dan dari ke 6 indikator tersebut dapat diurutkan dari yang paling efektif ada kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas sistem, kepuasan pengguna, <i>net benefit</i> , dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia berada pada posisi kurang efektif, hal tersebut dikarenakan para pegawai belum semuanya bisa membuat konten terkait informasi yang baik seperti membuat berita dan artikel-artikel yang menarik, dan juga kurangnya regenerasi di dalam struktur pemerintahan Desa Dlingo. Oleh karena itu, harus diadakan diklat atau pelatihan terkait pembuatan konten informasi yang baik, dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) yang benar agar masyarakat merasa lebih puas dengan isi dari informasi yang diberikan selain itu harus adanya regenerasi di dalam pemerintahan desa agar ada tenaga baru yang bisa membantu pegawai lama yang sudah lanjut usia hal tersebut pemerintah perlu melakukan <i>open</i> rekrutmen terkait regenerasi sumber daya manusia.
2018	Yahya Asmu'i	Efektivitas <i>Website</i> Desa Sebagai Media Transparansi Anggaran dan Belanja Desa Di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.	Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas <i>website</i> desa sebagai media transparansi APBDes di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.	Untuk mengukur efektivitas <i>website</i> desa sebagai media transparansi APBDes di Desa Terong dibangun konsep pengukuran berdasarkan UU KIP dan UU Desa beserta turunannya, yakni kemudahan akses, mudah dipahami, dan menjangkau target. Efektivitas <i>website</i> desa sebagai media transparansi APBDes di Desa Terong, dapat dikatakan tidak efektif. Kesimpulan tersebut didapatkan dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa kriteria “menjangkau target” tidak terpenuhi, sedangkan kendala dalam proses transparansi APBDes menggunakan <i>website</i> yaitu, (1) sikap

Tahun	Pengarang	Artikel	Tujuan	Temuan
				apatis masyarakat, (2) kurangnya pengetahuan teknologi informasi, (3) budaya atau kebiasaan dalam memperoleh informasi.
2019	Firman Firdausi	Efektivitas Sistem Informasi Kelurahan (SIK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Kelurahan Sisir Batu Kota Malang).	Untuk mengetahui Efektivitas Sistem Informasi Kelurahan (SIK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Kelurahan Sisir Kota Batu).	Efektivitas Sistem Informasi Kelurahan (SIK) dalam meningkatkan pelayanan publik sudah cukup baik, dapat dilihat dari indikator pengukuran efektivitas menurut Sutrisno, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kelurahan (SIK) dalam meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Sisir Kota Batu ialah adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara kelurahan dan catatan sipil serta SDM yang sudah meningkat serta adanya <i>server</i> yang mencukupi, komputer yang memadai dan layak pakai serta staf atau petugas pelayanan yang ramah berkompeten. Pada faktor penghambatnya merupakan berupa gangguan jaringan internet yang berakibat pada sistem tersebut, sehingga beralih ke pelayanan yang bersifat manual serta adanya selisih jumlah penduduk, sehingga perlu diadakan <i>update</i> data di setiap bulan.

Sumber: Olah Data Peneliti Tahun 2020

Pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penulis mencantumkan empat jurnal yang membedakan antara penelitian di atas dengan penelitian ini. Pada tahun 2013, Arib Hilmy Raihan melakukan penelitian mengenai Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara, yang menggunakan pengukuran efektivitas menurut Siagian, yaitu sumber daya, dana dan fasilitas

penunjang, mutu dan jumlah barang atau jasa, batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa, dan tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas yang sudah dirumuskan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Apriyansyah pada tahun 2018, dengan judul Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Penelitian tersebut menggunakan enam indikator efektivitas Sistem Informasi Desa, yang dapat diurutkan yang paling efektif ada kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas sistem, kepuasan pengguna, *net benefit*, dan yang terakhir ada sumber daya manusia.

Pada tahun yang sama, Yahya Asmu'i melakukan penelitian mengenai Efektivitas *Website* Desa Sebagai Media Transparansi Anggaran dan Belanja Desa Di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, yang membangun konsep pengukuran efektivitas berdasarkan UU KIP dan UU Desa beserta turunannya, yakni kemudahan akses, mudah dipahami, dan menjangkau target.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Firman Firdausi pada tahun 2019, yang melakukan penelitian mengenai Efektivitas Sistem Informasi Kelurahan (SIK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Kelurahan Sisir Batu Kota Malang). Di dalam penelitiannya menggunakan indikator pengukuran efektivitas menurut Sutrisno, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas terletak pada lokus, yakni di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dengan fokus mengenai efektivitas Sistem Informasi

Desa. Di dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Bodnar, yang mengatakan bahwa terdapat lima fenomena efektivitas sistem informasi berbasis teknologi, yaitu keamanan data, waktu, ketelitian, variasi laporan atau *output*, dan relevansi. Di dalam penelitian ini juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh Wower & Widhiyani, yakni mengenai ukuran efektivitas penerapan sistem informasi adalah kualitas informasi dan teknologi informasi.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler and Plano (dalam Keban, 2014:3), adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Terdapat variasi persepsi tentang administrasi publik. Variasi makna administrasi publik dapat dilihat dari persepsi orang tentang kata “administrasi publik” itu sendiri. Ada yang menerjemahkan administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi dari publik, ada yang *administration for public* atau administrasi untuk publik, bahkan ada yang melihatnya sebagai *administration by public* atau administrasi oleh publik. Variasi terjemahan tersebut sangat menarik, karena dapat menunjukkan suatu rentangan kemajuan administrasi

publik mulai dari administrasi publik yang berparadigma paling tidak demokratis sampai yang paling demokratis, atau dari yang tidak memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat sampai ke yang benar-benar memperhatikan pemberdayaan masyarakat (Keban, 2014:4).

Definisi administrasi publik bervariasi bahkan sulit untuk disepakati. Variasi ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat Stillman II (dalam Keban, 2014:5), yakni sebagai berikut:

1. Dimock, Dimock, & Fox, administrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi atau serupa dengan bisnis, tetapi menghasilkan barang dan pelayanan publik.
2. Barton & Chappel, melihat administrasi publik sebagai “*the work of government*” atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Definisi ini lebih menekankan aspek keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan kepada publik.
3. Starling, melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain, batasan tersebut menekankan aspek *the accomplishing side of government* dan seleksi kebijakan publik.
4. Nigro & Nigro, melihat administrasi publik sebagai usaha kerja sama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang, yaitu: yudikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam

memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik, yang sangat membedakan dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan pada proses institusional, yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari sektor swasta.

5. Rosenbloom, melihat administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum. Hal tersebut memiliki fungsi untuk memenuhi mandat pemerintah, yakni dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan dalam masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Definisi ini menekankan aspek proses institusional atau kombinasi ketiga jenis kegiatan pemerintah yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
6. Nicholas Henry, memberi batasan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, yang bertujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, serta untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktik yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa pendapat mengenai administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik. Keterkaitan administrasi publik dengan penelitian ini adalah Sistem Informasi Desa merupakan sebuah *platform* teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Desa Purwogondo, yang bertujuan mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat Desa yang bersifat bebas dan terbuka. Di dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa, pembinaan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan di tingkat desa maupun melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait pengelolaan Sistem Informasi Desa.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu.

Kajian dan praktik administrasi publik di berbagai negara terus berkembang. Berbagai perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh administrator publik. Kompleksitas ini ditanggapi oleh para teoritis dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. Denhardt & Denhardt mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah *Old Public Administration*, *New Public Management*, dan *New Public Service*.

Model *Old Public Administration* atau Administrasi Publik Klasik memberikan perhatian pada bagaimana pemerintah melakukan tindakan administrasi secara demokratis, efisien dan efektif, dan bebas dari manipulasi kekuasaan, serta bagaimana pemerintah dapat beroperasi secara tepat, benar, dan berhasil (Wilson,1887). Fokus perhatiannya adalah interaksi dan kerja sama di dalam organisasi pemerintah yang dibangun melalui hierarki. Model ini memberikan peran yang sangat besar kepada pemerintah, baik dalam perumusan kebijakan maupun penyampaian pelayanan publik. Sifat yang hierarkis dan berpusat pada pemerintah, maka hubungan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat cenderung dimaknai sebagai hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, interaksi sepihak dan tidak setara, kerja sama struktural dan formal, atau pada titik yang paling ekstrem, tidak ada kolaborasi sama sekali.

Perspektif NPM memperoleh kritik keras dari banyak pakar. Mereka memandang bahwa perspektif ini, seperti halnya perspektif *Old Public Administration*, tidak hanya membawa teknik administrasi baru, namun juga seperangkat nilai tertentu. Masalahnya terletak pada nilai-nilai yang dikedepankan tersebut seperti efisiensi, rasionalitas, produktivitas dan bisnis karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik dan demokrasi. J.V Denhardt dan R.B Denhardt tahun 2003 memperkenalkan paradigma *The New Public Service*. Keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip Administrasi Publik Tradisional dan *New Public Management* dan beralih ke paradigma *The New Public Service*. *The New Public Service* adalah teori manajemen publik yang mengajarkan egaliter dan persamaan hak di antara warga negara. Model ini menekankan bahwa

kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik bukan dirumuskan oleh elite politik seperti yang tertera dalam aturan. Di dalam buku Denhardt (2003), berjudul “*The New Public Service: Seving, Not Stering*”. Pada halaman pendahuluan menyatakan *New Public Service* (NPS) lebih diarahkan pada *democracy, pride and citizen* dari pada *market, competition and customers* seperti sektor privat. Denhardt menyatakan “*public servants do not deliver customers service, they deliver democracy*”. Oleh sebab itu, nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dalam proses pelayanan untuk kepentingan publik sebagai norma mendasar lapangan administrasi publik.

Berdasarkan paradigma administrasi publik yang telah dijelaskan di atas, paradigma yang sesuai dengan penelitian ini yaitu paradigma *New Public Service*. Hal tersebut karena pada saat ini organisasi dituntut menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, salah satunya melalui Sistem Informasi Desa.

1.6.4 Manajemen Publik

Definisi manajemen menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014:92), yakni manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri, yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini tidak hanya menunjukkan proses pencapaian tujuan, melainkan juga sekelompok orang yang bertanggung jawab menjalankan proses tersebut.

Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2014:92), melihat manajemen publik sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu,

sebagai serangkaian keterampilan (*skills*), dan sebagai serangkaian tugas. Adapun empat klaster kompetensi yang ada dalam manajemen yaitu:

1. Klaster manajemen tujuan dan aksi;
2. Klaster pengarahan terhadap bawahan;
3. Klaster manajemen sumber daya manusia;
4. Klaster kepemimpinan.

Sementara itu, ada tipe manajemen khusus yang disebut sebagai manajemen publik, yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman (dalam Keban, 2014:92), mengemukakan bahwa manajemen publik bukan *scientific management*, meskipun sangat dipengaruhi olehnya. Manajemen publik bukan *policy analysis*, bukan juga “administrasi publik baru”, atau kerangka yang lebih baru. Akan tetapi, manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi *rational-instrumental* pada satu pihak dan orientasi politik di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen, seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

Pengembangan manajemen publik di masa datang, menurut *The National in Public Service* di Amerika Serikat menurut Ott, Hyde dan Shafritz (dalam Keban, 2014:93), perlu memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Perlu mengidentifikasi secara jelas peran dari pelayan publik dalam proses yang demokratis, sekaligus standar etika dan kinerja yang tinggi dari para pejabat kunci;

2. Perlu fleksibilitas dalam menata organisasi, termasuk kebebasan mempekerjakan dan memecat pegawai yang harus diberikan kepada para petinggi kabinet dan pimpinan instansi;
3. Pengangkatan atau penunjukan pejabat oleh presiden harus dikurangi, dan lebih diberikan ruang pengembangan karier profesional; dan
4. Pemerintah harus melakukan investasi lebih besar dibanding pendidikan dan pelatihan eksekutif dan manajemen.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah manajemen instansi pemerintah (Keban, 2014:92). Pada dasarnya manajemen publik digerakkan oleh sumber-sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keterkaitan manajemen publik dengan penelitian ini adalah guna mencapai tujuan organisasi yakni pada tingkat desa, maka membutuhkan suatu sumber daya salah satunya teknologi informasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi melalui penerapan Sistem Informasi Desa, sehingga adanya Sistem Informasi Desa dapat mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

1.6.5 Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata “efek” yang memiliki arti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau

dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses. Menurut Gibson dkk (dalam Pasolong, 2013:4), efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran yang dimaksud menunjukkan derajat efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2017:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010:143), yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Hal tersebut juga dikatakan oleh Husein dan Lubis (dalam Arindya, 2019:66), yang menyatakan bahwa dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Atau dengan kata lain, suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Pekei (2016:69), efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur dalam suatu organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik. Dengan demikian, kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran utama. Menurut Moore D. Kenneth (dalam Sumantri, 2015:1), efektivitas merupakan suatu

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target meliputi kuantitas, kualitas dan waktu telah tercapai, atau dapat dikatakan semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.

Menurut Susanto (2013:39), efektivitas artinya informasi harus sesuai dan secara lengkap mendukung kebutuhan pemakai, yang mendukung proses pelaksanaan dan tugas pengguna, serta disajikan dalam waktu dan format yang tepat, konsisten dengan format sebelumnya, sehingga mudah dipahami. Organisasi yang besar maupun kecil memiliki tujuan yang sama, yakni ingin merealisasikan seluruh tujuan-tujuannya secara efektif.

Terdapat tiga ukuran efektivitas menurut Steers (dalam Arindya, 2019:67), yakni sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, maka diperlukan pentahapan. Pentahapan tersebut dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari faktor prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Agar organisasi mampu beradaptasi dengan lingkungannya, perlu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari faktor peningkatan kemampuan, dan sarana prasarana.

Adapun indikator efektivitas menurut Gibson (dalam Tasya, 2017:26), adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas, menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu *output* yang sesuai dengan permintaan lingkungan. Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan *output* yang dikonsumsi oleh pelanggan organisasi.
2. Efisiensi, merupakan angka perbandingan antara *output* dengan *input*, perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan *output* dengan waktu merupakan bentuk umum dari ukuran ini.
3. Fleksibilitas, menggambarkan seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan internal dan eksternal. Kriteria ini berhubungan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan maupun dalam organisasi itu sendiri.
4. Keunggulan, menggambarkan kelebihan organisasi dibandingkan dengan organisasi lain. Kemampuan individu di dalam organisasi sangat diperhitungkan dan dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi organisasi.
5. Pengembangan, dapat dilakukan dengan usaha melalui program pelatihan atau sosialisasi bagi tenaga manajemen/masyarakat dan non manajemen. Saat ini,

pengembangan organisasi telah bertambah berbagai macam dan meliputi sejumlah pendekatan psikologi maupun sosiologi.

6. Kepuasan, adalah istilah yang serupa yakni menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan/masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tolok ukur keberhasilan dari suatu usaha yang telah dilakukan, serta merupakan sebuah proses sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.6.6 Sistem Informasi Manajemen

Teknologi informasi yang berkembang pesat memacu organisasi untuk menggunakan teknologi informasi sebagai pengolah dan penyedia informasi. Saat ini, teknologi informasi telah menjadi faktor yang sangat dominan. Penerapan sistem informasi dianggap sebagai solusi bagi organisasi untuk memecahkan permasalahan. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik merupakan pendorong dan fasilitator dalam keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan perlu didukung oleh kecepatan arus informasi dan data antar instansi. Tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah berupaya mewujudkan pelayanan yang memadai kepada rakyat. Di dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan sistem informasi akan mendorong aparatur pemerintahan guna meningkatkan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan untuk menuju terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Kemajuan sistem informasi akan menciptakan tuntutan baru dari publik terhadap pemerintah.

Sistem informasi yang diterapkan dalam organisasi adalah komponen yang menjadi bagian dari organisasi. Organisasi bersama dengan individu di dalamnya saling berinteraksi agar mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu bentuk sistem informasi yang berfungsi untuk membantu para penggunanya dalam mengambil keputusan. Suatu organisasi mempunyai sistem informasi yang efektif apabila dengan menggunakan sistem informasi tersebut, maka tujuan organisasi dapat tercapai. Demikian juga pada organisasi sektor publik, di mana penggunaan sistem informasi yang efektif akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan dari penerapan sistem informasi manajemen untuk menyediakan informasi dalam menunjang pengambilan keputusan, serta pengawasan dalam kegiatan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari segi pencapaian tujuan organisasi agar dapat dikategorikan efektif atau tidak. Makna efektif dapat diistilahkan sebagai hasil guna, atau dengan kata lain bahwa efektivitas tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan sistem informasi pada organisasi bergantung pada bagaimana sistem itu dijalankan, serta bagaimana sistem memberikan kemudahan bagi para pemakainya serta mampu memanfaatkan teknologi yang digunakan.

1.6.6.1 Sistem

Menurut Mc Leod (dalam Darmawan dan Fauzi, 2013:4), sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan, sedangkan menurut Sutabri (2012:6), sistem adalah sekelompok

unsur yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, serta berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Adapun menurut Susanto (2013:22), sistem adalah suatu kumpulan dari sub sistem/bagian/komponen berupa komponen fisik dan non fisik, yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem memiliki fungsi dasar, hal tersebut dikemukakan oleh Sudirman et al. (2020:15), yakni:

- a. *Input*, melibatkan pengambilan dan pemasangan elemen yang masuk ke dalam sistem yang kemudian untuk diproses.
- b. *Pemrosesan*, melibatkan proses transformasi untuk mengubah *input* menjadi *output*.
- c. *Output*, melibatkan transfer elemen yang dihasilkan oleh proses transformasi ke tujuan akhir.

Menurut Sudirman et al. (2020:4), sistem memiliki ciri-ciri yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Component*

Component adalah suatu sistem memiliki beberapa elemen atau unsur-unsur atau unit-unit yang tersendiri, namun akan terintegrasi dengan sistem tersebut.

- b. *Boundary*

Boundary adalah batas sistem yang harus berbeda atau terpisah dengan sistem lain atau lingkungan di luar sistem.

- c. *Environment*

Environment, yakni lingkungan luar yang bukan termasuk ke dalam suatu sistem.

d. *Interface*

Interface adalah penghubung antar elemen luar dengan sistem.

e. *Input*

Input adalah masukan yang akan diproses oleh sistem.

f. *Process*

Process adalah suatu sistem harus memiliki unit pengolahan.

g. *Output*

Output adalah keluaran atau hasil dari pengolahan

h. *Objective*

Objective yakni suatu sistem harus memiliki sasaran atau tujuan (*goal*).

Dari penjelasan mengenai sistem di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari sub sistem yang membentuk suatu sistem yang lebih besar yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

1.6.6.2 Informasi

Menurut Sutabri (2012:22), informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut (Sutanta 2011:10), informasi merupakan hasil pengolahan data, sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan dasar dalam pengambilan keputusan, sedangkan menurut Kumorotomo, W., & Margono (2011:10), informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat di komunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan, sedangkan data menunjuk kepada fakta-fakta, baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar,

bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode tertentu. Menurut Marshall and Paul (2015:4), informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Informasi mempunyai beberapa fungsi menurut Sutanta (2011:10), fungsi suatu informasi yaitu:

- a. Menambah pengetahuan, pengetahuan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung proses pengambilan keputusan.
- b. Mengurangi ketidakpastian, dapat digunakan sebagai menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan.
- c. Mengurangi risiko kegagalan, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.
- d. Mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak di perlukan.
- e. Memberi standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran dan keputusan-keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut Ahmad (2018:9), adalah sebagai berikut:

- a. *Accessibility*

Accessibility artinya, informasi harus mudah diakses, ada/tersedia, semakin mudah dan semakin banyak informasi maka akan semakin baik.

- b. *Timelines*

Timelines artinya tepat waktu, informasi yang baik harus cepat disampaikan karena informasi yang terlambat akan berakibat tidak baik.

c. *Relevance*

Relevance artinya, informasi yang dihasilkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan atau orang yang membutuhkannya.

d. *Accuracy*

Accuracy artinya, informasi harus tepat, akurat, bebas dari kesalahan.

e. *Precision*

Precision artinya, informasi harus presisi atau terperinci/detail.

f. *Useful*

Useful artinya, informasi yang bermanfaat, memiliki nilai kegunaan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah yang bertujuan agar bermakna bagi yang menggunakannya, sehingga dapat dikomunikasikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

1.6.6.3 Sistem Informasi

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan. Hal tersebut berarti meliputi proses mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam sebuah organisasi. Menurut Sutabri (2012:38), sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian. Sistem informasi dapat dikatakan sebagai fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi, yang bertujuan agar dapat menyediakan informasi kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Pengertian sistem informasi juga disampaikan oleh Jimmy (dalam Sudirman et al, 2020:2), yang mengatakan bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem yang berguna untuk kepentingan organisasi. Sistem yang dimaksud dalam bentuk pengolahan transaksi dan pengolahan informasi untuk fungsi manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Karakteristik sistem informasi yang valid dan dapat dipercaya pada dasarnya memiliki persyaratan, yakni informasi yang diberikan harus memiliki nilai *surprises* dan harus dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan (Sudirman et al, 2020:2).

O'Brien dan Marakas (dalam Sudirman et al, 2020:17), menekankan terdapat empat konsep utama yang dapat diterapkan untuk semua jenis sistem informasi, yakni:

- a. Orang, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan adalah lima sumber daya dasar sistem informasi.
- b. Sumber daya manusia mencakup pengguna akhir dan spesialis sistem informasi, sumber daya perangkat keras terdiri dari mesin dan media, sumber daya perangkat lunak mencakup program dan prosedur, sumber daya data mencakup basis data dan pengetahuan, dan sumber daya jaringan mencakup media jaringan dan jaringan komunikasi.
- c. Sumber daya data ditransformasikan oleh kegiatan pemrosesan informasi menjadi beragam produk informasi bagi pengguna akhir.
- d. Pemrosesan informasi terdiri dari aktivitas sistem *input*, pemrosesan *output*, penyimpanan dan kontrol.

Adapun manfaat dari adanya sistem informasi menurut Yakub (2012:8), antara lain:

- a. Meningkatkan akses dalam menyajikan data yang tepat waktu dan akurat bagi penggunaannya;
- b. Menyediakan sistem informasi yang berkualitas dan bermanfaat;
- c. Mengembangkan suatu proses perencanaan secara efektif;
- d. Mampu menginvestasikan sistem informasi yang telah ditetapkan pada suatu organisasi;
- e. Melihat kemudian mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan serta keterampilan guna mendukung sistem informasi; dan
- f. Memberikan informasi yang cepat, tepat, dan terkini.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah serangkaian dari sejumlah komponen yang saling berhubungan, kemudian akan membentuk satu kesatuan guna memproses data menjadi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

1.6.6.4 Manajemen

Manajemen merupakan suatu penggunaan atau pemanfaatan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, Sutanta (2011:17). Umumnya sumber daya yang tersedia dalam manajemen meliputi manusia, material, dan modal, sedangkan menurut Stoner dan Freeman (dalam Safroni, 2012:44), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen adalah kegiatan yang

dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau aktivitas secara bersama-sama, dengan cara melibatkan orang lain demi mencapai suatu tujuan yang sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Griffin (dalam Taufiqurokhman, 2018:1), mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*). Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional.

1.6.6.5 Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu terdiri dari rangkaian yang terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang bergerak bersama-sama, berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen suatu organisasi (Hartono, 2013:20). Menurut Gordon B. Davis (dalam Ahmad, 2018:15), sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau

mesin yang terpadu, yang bertujuan untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, sedangkan menurut Barry E. Cushing (dalam Prasojo, 2013:9), Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sekumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi, yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data. Pengumpulan dan pengolahan data, bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Sistem informasi manajemen berperan dalam pengolahan data untuk menghasilkan *output* (keluaran) berupa informasi, yang kemudian disajikan sebagai gambaran dalam peningkatan mutu suatu lembaga pemerintah. Sistem informasi manajemen tidak akan terlepas dari peran manusia dan komputerisasi yang memanfaatkan komputer, dalam hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan pimpinan lembaga pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan demi tercapainya kebutuhan masyarakat.

Gaol (dalam Sudirman et al, 2020:7), mengatakan *management information system* adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi, yang digunakan sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen. Sistem yang dimaksud berupa sistem yang menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, komputer, model untuk menganalisis, merencanakan, mengendalikan, membuat keputusan, dan sebuah basis data. *Management information system* dapat digambarkan melalui susunan piramida tingkatan *management information system* berikut ini:

Gambar 1.5
Tingkatan Sistem Informasi Manajemen



Sumber: Sudirman, 2020:7

Menurut O'Brien dan Marakas (dalam Sudirman et al, 2020:7), *management information system* merupakan sekumpulan komponen dalam sistem informasi dengan mengekstrak data menjadi informasi, dengan cara mengintegrasikan komponen sistem informasi berupa *people, hardware, software, communication network*, dan data *resources*. Sistem informasi manajemen juga dapat diartikan sebagai bagian dari pengendalian internal suatu organisasi maupun perusahaan, yang dilakukan terorganisasi, kemudian membentuk sistem perencanaan antara manusia dengan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen dan prosedur.

Menurut Nugroho (dalam Sudirman et al, 2020:9), fungsi utama yang diterapkan pada sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut:

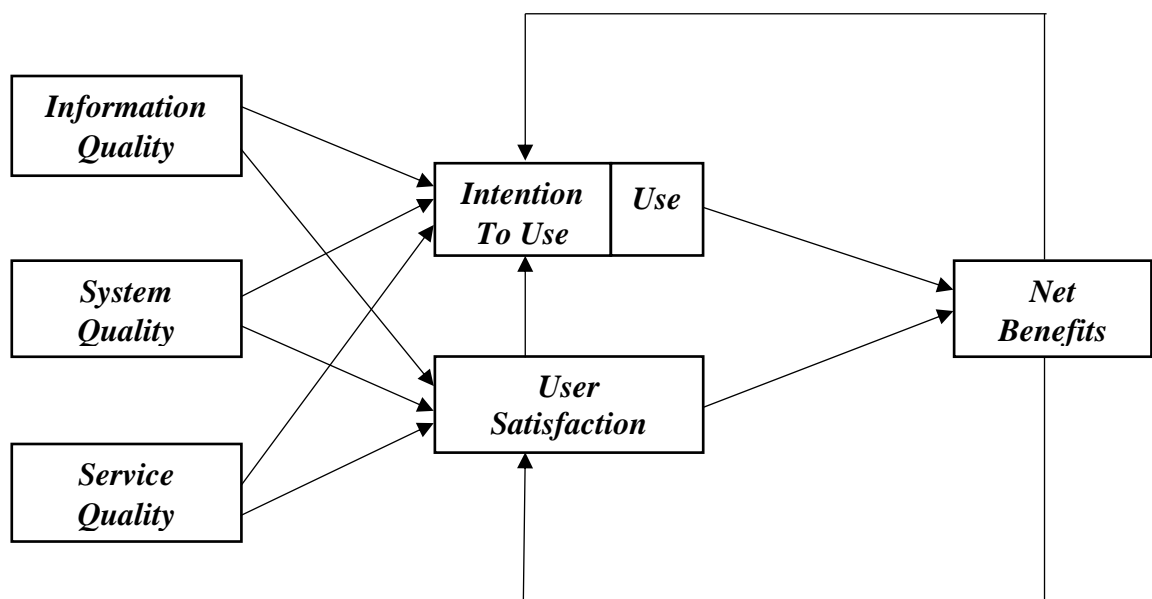
1. Sebagai salah satu instrumen dalam mempermudah pihak manajemen dalam melakukan fungsi manajemen, yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.
2. Terciptanya sistem organisasi yang akurat dan tepat waktu berdasarkan orientasi dari penggunaan data yang efektif dan efisien.
3. Membentuk suatu pola kreativitas dalam organisasi dengan berorientasi pada daya produktivitas dan penghematan biaya penggunaan sumber daya organisasi.
4. Terbentuknya sistem kerja yang terkoordinasi dan terorganisasi, sehingga dapat membentuk karakter sumber daya manusia yang memiliki kualitas.

Menurut Murdick, Ross dan Clagget (dalam Sudirman et al, 2020:9), terdapat tiga tujuan yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen, antara lain:

1. *Social system* yang disebut dengan organisasi.
2. *System of management* yang digunakan organisasi dan sub-sub sistemnya dalam rangka meningkatkan praktik dari operasi-operasi dan produktivitas.
3. *Management information system* merupakan komponen dari proses manajemen pada organisasi yang berfungsi sebagai penyelenggaraan informasi yang memiliki nilai-nilai integritas dalam pengambilan keputusan.

DeLone dan McLean (dalam Sitoresmi, 2013:33), mengemukakan bahwa komponen dari kesuksesan sistem informasi mempunyai enam dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas sistem informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pemakai, dan keuntungan profit. Model ini dikenal dengan *D&M Information System Model* yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.6
DeLone & McLean *Information System Success Model*



Sumber: DeLone & McLean (dalam Sitoresmi, 2013:33)

1. *System Quality* (kualitas sistem), digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasi.
2. *Information Quality* (Kualitas Informasi), mengukur kualitas keluaran/output dari sistem informasi.
3. *Service Quality* (Kualitas Pelayanan), dalam mengukur kualitas pelayanan, suatu sistem informasi membutuhkan dukungan dari personel/staff dari organisasi.

4. *Use* (Penggunaan), mengukur penggunaan keluaran/*output* suatu sistem informasi oleh pengguna.
5. *User Satisfaction* (Kepuasan Pemakai), yaitu respons pemakai terhadap penggunaan keluaran sistem informasi.
6. *Net Benefit* (Keuntungan bagi organisasi), merupakan dampak dari informasi terhadap organisasi seperti profit bagi perusahaan, memangkas biaya operasional (*cost effective*).

Menurut Bodnar (dalam Evayani, 2018:105), beberapa fenomena efektivitas sistem informasi berbasis teknologi adalah sebagai berikut:

1. Keamanan data, berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem.
2. Waktu, berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun non periodik, untuk rentang waktu yang telah ditentukan.
3. Ketelitian, berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi.
4. Variasi laporan atau *output*, berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Di dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk

membuat suatu laporan dengan pengembangan dan penghitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.

5. Relevansi, menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data.

Selain beberapa fenomena efektivitas sistem informasi di atas, menurut Wower & Widhiyani (2012:13), ukuran efektivitas penerapan sistem informasi yakni kualitas informasi dan teknologi informasi.

1. Kualitas informasi, merupakan tingkat kemampuan sistem untuk menghasilkan informasi yang benar-benar berguna sesuai dengan harapan pengguna.
2. Teknologi informasi, merupakan teknologi komputer yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan didukung sistem yang ada.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sekumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan antara sistem satu dengan yang lainnya, serta bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

1.6.7 Sistem Informasi Desa

Kehadiran media baru telah memengaruhi sedemikian rupa upaya organisasi untuk mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi media baru (internet). Di dalam organisasi publik, tercermin dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan urusan publik. Badan-badan pemerintahan telah mengembangkan suatu upaya untuk membangun sistem informasi publik. Hal tersebut juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa

tercermin dengan sangat baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang tersebut berbunyi “Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.”

Sistem Informasi Desa (SID) mempunyai dua pengertian, dalam arti sempit dan luas. Di dalam arti sempit, Sistem Informasi Desa (SID) dimaksudkan sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Di dalam arti luas, Sistem Informasi Desa (SID) dapat diartikan sebagai suatu rangkaian atau sistem baik mengenai mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas, (Jahja, Haryana, *and* Rendra, 2012:19). Menurut Sulistyowati, Dibyorini, *and* Tyas, (2017:581), secara sederhana Sistem Informasi Desa (SID) didefinisikan sebagai informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa.

Sistem Informasi Desa (SID) dianggap sebagai alternatif yang bermanfaat sebagai instrumen dan ruang akuntabilitas publik untuk membangun *self-governing*, yang dilengkapi aplikasi untuk mengelola data-data secara sekaligus. Menurut Rianto (2017:3), terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan Sistem Informasi Desa ini, salah satu yang paling utama agar pengolahan atau pengelolaan data lebih efektif dan efisien. Sistem Informasi Desa (SID) tumbuh dalam merespons perkembangan lingkungannya yang menjadi embrio, yang mampu memberikan akselerasi tentang keterbukaan informasi publik,

transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kelahiran Sistem Informasi Desa (SID) berangkat dari kebutuhan untuk memperbaiki tentang kapasitas dalam menyimpan data maupun mengolah data-data yang ada di desa.

Banyaknya aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang dibuat oleh berbagai macam organisasi mencerminkan antusiasme organisasi dalam mengembangkan Sistem Informasi Desa. Menurut Purwoko (dalam Rianto, 2017:5), terdapat persoalan terkait dengan Sistem Informasi Desa, yakni adalah lemahnya *governance*. Banyaknya program yang bersifat sektoral menyebabkan sulitnya mengambil keputusan secara rasional, banyaknya format laporan, kemampuan dan kualitas data yang sangat kurang, ketiadaan kerja sama dan koordinasi antar Kementrian yang membuat implementasi sistem informasi desa semakin sulit.

Di dalam pengembangan Sistem Informasi Desa masih dijumpai faktor penghambat Sistem Informasi Desa menurut Rianto (2017:6), yakni struktur dan kultur birokrasi. Struktur organisasi yang tertutup dan berorientasi ke atas menciptakan ruang bagi terhambatnya inovasi dalam pemerintahan, sehingga sistem informasi yang semestinya dapat membangun partisipasi maupun memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan sering kali terhambat atau bahkan gagal diwujudkan. Di dalam kerangka Sistem Informasi Desa, pada akhirnya kebijakan bersifat *top down* atau yang lebih parah tidak ada desain untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Desa. Faktor penghambat lainnya adalah mengenai sumber daya yang ada, yakni internet desa atau infrastruktur yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan internet protokol (panduan dan regulasi

konektivitas yang mengatur jaringan), domain, akses, *exchange*, *hosting* dan *impact* (berlaku umum untuk seluruh warga dalam bentuk akses, desain, dan layanan).

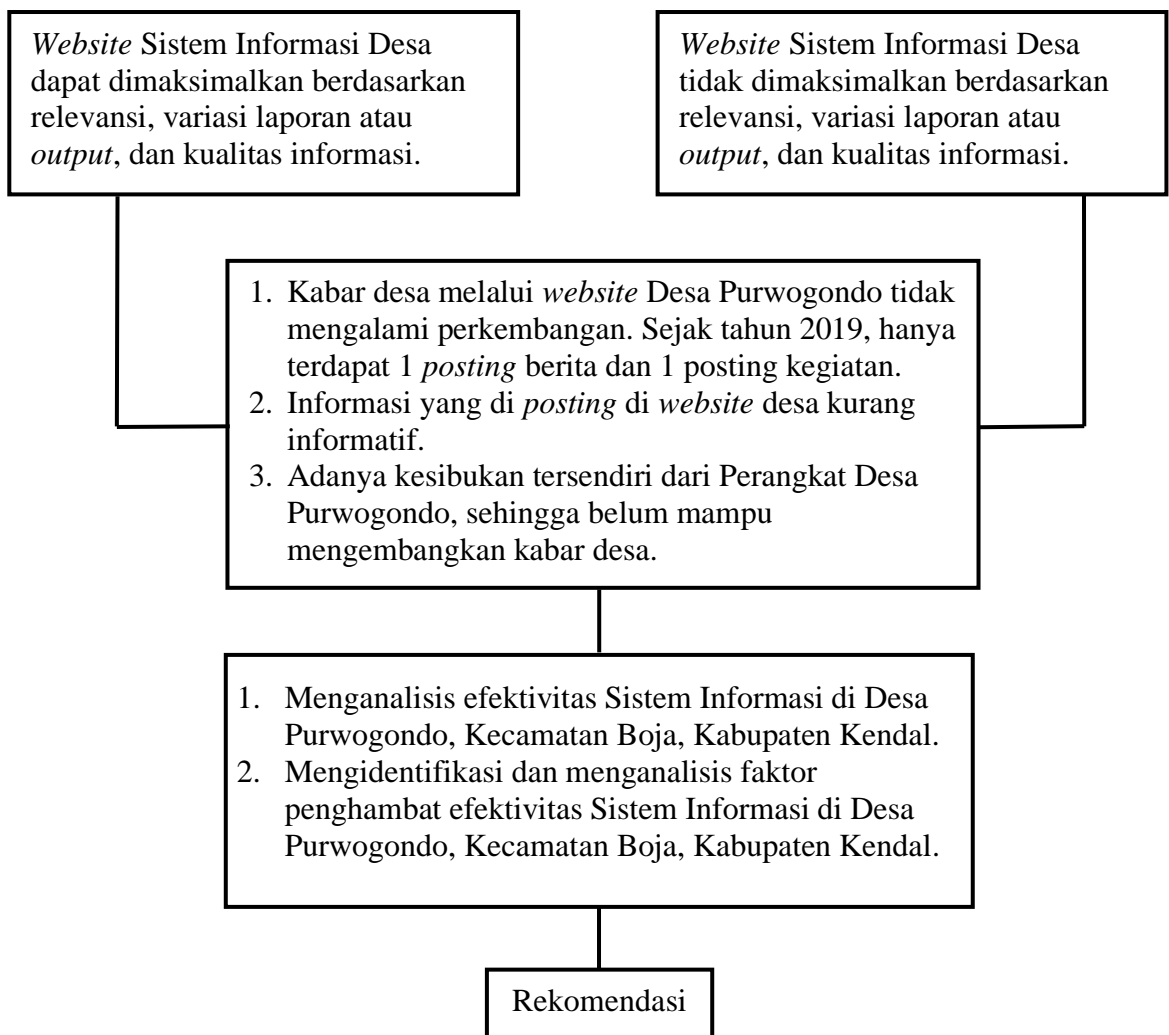
Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai Sistem Informasi Desa di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Desa adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi perangkat lunak, yang dikembangkan untuk mengelola data-data desa dan dioperasikan oleh Perangkat Desa.

Efektivitas Sistem Informasi Desa adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan dari Sistem Informasi Desa, yang merupakan salah satu bentuk sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang telah diterapkan oleh desa. Tolok ukur keberhasilan Sistem Informasi Desa dapat dilihat melalui kesesuaian dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar efektivitas Sistem Informasi Desa dapat diketahui, maka dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Bodnar, yang mengatakan bahwa terdapat lima fenomena efektivitas sistem informasi berbasis teknologi, yang meliputi keamanan data, waktu, ketelitian, variasi laporan atau *output*, dan relevansi, kemudian teori lain diungkapkan oleh Wower dan Widhiyani yang terdiri dari kualitas informasi dan teknologi informasi. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, kemudian penulis memilih tiga fenomena efektivitas sistem informasi berbasis teknologi yang disesuaikan dengan penelitian, yang meliputi relevansi, variasi laporan atau *output*, dan kualitas informasi.

1.6.8 Kerangka Pikir Penelitian

Sebagai upaya untuk mempermudah melihat langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, maka peneliti membuat sebuah alur penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.7
Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Fenomena Penelitian

Tata kelola pemerintahan desa dalam rangka mengelola Sistem Informasi Desa merupakan masalah yang penting untuk dilakukan penelitian, karena Sistem Informasi Desa merupakan salah satu wujud transparansi oleh pemerintah desa yang disampaikan melalui informasi yang ada di sistem informasi desa.

Adapun fenomena penelitian yang akan diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Relevansi, merupakan data yang disajikan sistem sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna.
 - a. Relevansi dalam penyajian informasi.
 - b. Relevansi sistem terhadap pengguna.
2. Variasi laporan atau *output*, berkaitan dengan tingkat kemampuan sistem untuk membuat laporan yang bervariasi, sehingga laporan tersebut dapat berguna bagi pengguna informasi.
 - a. Sistem dapat memberikan laporan secara berkala.
 - b. Sistem dapat memberikan laporan pada pengguna sistem dengan variatif.
3. Kualitas informasi, berkaitan dengan tingkat kemampuan sistem untuk menghasilkan informasi yang berguna sesuai dengan harapan pengguna.
 - a. Informasi mudah dimengerti oleh pengguna.
 - b. Sistem menghasilkan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya.
 - c. Informasi yang dihasilkan oleh sistem merupakan informasi yang *up to date*.

Adapun faktor penghambat dalam efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dapat ditemukan penulis di lokasi penelitian.

1.8 Metoda Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, kemudian disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian kualitatif dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Penelitian deskriptif, adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi ketika melakukan penelitian. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi di lokasi penelitian serta melihat kaitan antar variabel.

- b. Penelitian eksploratif, adalah suatu penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari dan belum memiliki hipotesis. Penelitian ini dapat merumuskan masalah dengan lebih jelas dan terperinci.
- c. Penelitian eksplanatori, adalah penelitian yang berguna untuk menguji tentang hubungan antar variabel-variabel yang diteliti dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait fenomena sosial yang diteliti yang kemudian dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimaksudkan agar penelitian menghasilkan kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, sehingga peneliti dapat membahas lebih dalam tentang arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini mencoba menjelaskan sejauh mana efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal serta faktor penghambat efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat atau wilayah untuk penelitian agar peneliti mendapatkan informasi, data dan melakukan pengamatan penelitian. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2019:291), sebagai informan yang sebaiknya adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti, sehingga menggerakkan untuk dijadikan guru atau narasumber.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, karena pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun informan yang dipilih oleh peneliti adalah Kepala Desa Purwogondo, Sekretaris Desa Purwogondo, Perangkat/Pengelola Sistem Informasi Desa Purwogondo, dan masyarakat setempat.

1.8.4 Jenis Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, selebihnya adalah data tambahan yakni sumber data tertulis maupun

statistik. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2013:137), data primer adalah data diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2013:137), data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data

(Sugiyono, 2019:296). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan secara sistematis di mana peneliti mengamati dan mencatat terhadap kenyataan-kenyataan yang ditemukan. Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2019:297), observasi diklasifikasikan menjadi tiga yakni sebagai berikut:

1. Observasi berpartisipasi (*participant observation*)

Observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*)

Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, yakni peneliti dalam hal pengumpulan data menyatakan secara terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi.

3. Observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*)

Observasi tak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Di dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Penelitian ini menggunakan observasi tak berstruktur sebagai observasi awal yang digunakan untuk memperkuat latar belakang penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap informan dengan berpedoman pada *interview guide*, yang berguna untuk menyerap berbagai informasi mengenai pandangan, pendapat, dan pola pikir informan atau masalah penelitian. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mencari fakta-fakta yang belum terungkap, sehingga suatu fenomena sosial dapat dipahami. Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung yang terjalin antara peneliti dengan responden.

c. Dokumentasi

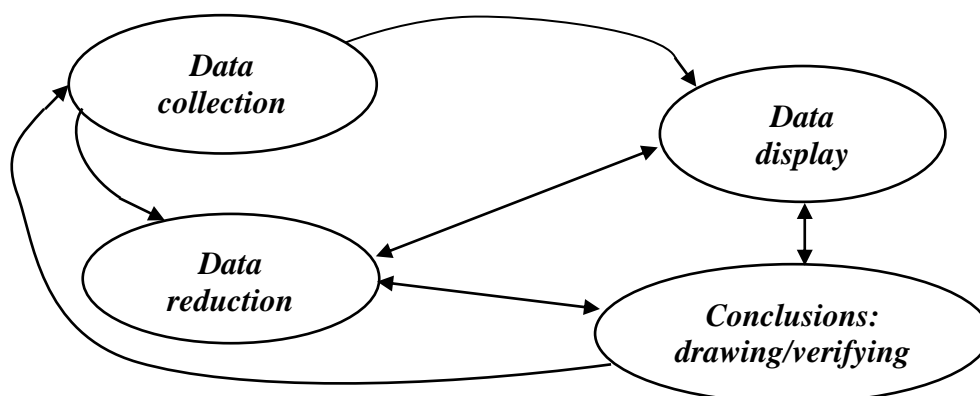
Metode dokumentasi diperoleh dari data-data terkait penelitian. Data yang dikumpulkan diperoleh dari sumber-sumber informasi berupa catatan literatur, buku-buku dan laman berhubungan dengan penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2019:319), mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles *and* Huberman (Sugiyono 2019:321), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *concluding drawing/verification*.

Gambar 1.8
Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



Sumber: Sugiyono, 2019:322

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan kegiatan untuk merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apabila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang perlu disusun, sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan. Menyajikan data

penelitian kualitatif biasanya dengan teks yang bersifat naratif (berbentuk catatan pada saat di lapangan), tabel, grafik, bagan. Peneliti melakukan penyajian data secara keseluruhan, dan pada akhirnya dapat menyusun kesimpulan, sehingga peneliti menyusun penyajian data dengan baik agar mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Analisis data di dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis taksonomi. Dilakukan dengan observasi terfokus. Menurut Sugiyono (2019:339), analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diuraikan secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi.

1.8.8 Kualitas Data

Teknik yang dilakukan untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Wiliam Wiersma (dalam Sugiyono, 2019:368) memberikan pengertian bahwa triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun tiga macam triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik, digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kredibilitas data dengan triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara ,observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, di mana peneliti tidak hanya mencari sumber informasi dengan wawancara satu informan saja, melainkan melakukan wawancara dengan informan yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai fakta di lapangan. Kemudian dipastikan kebenaran data dengan analisis data hasil wawancara sesuai dengan kondisi di lapangan melalui observasi dan dokumentasi.